

2023



**LAPORAN
PEREKONOMIAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2023
Volume 6, 2024**



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Katalog: 9199007.65
ISSN 2723-2360

<https://kaltara.bps.go.id>

**LAPORAN
PEREKONOMIAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2023
Volume 6, 2024**



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2023

Volume 6, 2024

Katalog: 9199007.65

ISSN: 2723-2360

Nomor Publikasi: 65000.24018

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25,0 cm

Jumlah Halaman: xii+59 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara

Penerbit:

©BPS Provinsi Kalimantan Utara

Sumber Ilustrasi:

Canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara

TIM PENYUSUN
LAPORAN PEREKONOMIAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2023
Volume 6, 2024

Pengarah:

Mas'ud Rifai

Penanggung jawab:

Mat Bandri

Penyunting:

Wisnu Damar Budimulia

Penulis Naskah dan Pengolah Data:

Anggia Firmanti Hermadita

Penata Letak:

Anggia Firmanti Hermadita

KATA PENGANTAR

Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara 2023

merupakan publikasi rutin tahunan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara. Publikasi ini menyajikan indikator-indikator makro terpilih untuk memberikan gambaran umum perekonomian Kalimantan Utara tahun 2023, serta series data beberapa tahun sebelumnya yang dihimpun dari BPS dan instansi lain. Informasi yang disajikan antara lain pertumbuhan ekonomi, perubahan harga-harga (inflasi), dana dan kredit perbankan, ekspor-impor luar negeri, ketenagakerjaan, dan kemiskinan.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang membantu hingga terbitnya publikasi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Tanjung Selor, April 2024
Kepala BPS
Provinsi Kalimantan Utara



Mas'ud Rifai

DAFTAR ISI
LAPORAN PEREKONOMIAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2023
Volume 6, 2024

Tim Penyusun.....	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Bab 1 Ringkasan Eksekutif	1
Bab 2 Pertumbuhan Ekonomi.....	5
Bab 3 Perkembangan Harga–Harga.....	15
Bab 4 Perdagangan Luar Negeri.....	23
Bab 5 Perbankan.....	37
Bab 6 Ketenagakerjaan Dan Kemiskinan.....	45
Daftar Pustaka.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara (Triliun Rupiah), 2019–2023.....	7
Tabel 2.2	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Utara, 2023.....	8
Tabel 2.3	Pertumbuhan Komponen Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Utara (persen), 2021–2023	11
Tabel 3.1	Inflasi Kalimantan Utara (gabungan) Menurut Kelompok Pengeluaran, 2023	19
Tabel 3.2	Sumbangan Inflasi Beberapa Komoditas yang Dominan terhadap Inflasi Provinsi Kalimantan Utara, 2023	20
Tabel 4.1	Nilai Ekspor Menurut HS 2 Digit, 2023	28
Tabel 4.2	Nilai Ekspor Menurut Pelabuhan Muat di Provinsi Kalimantan Utara, 2023.....	29
Tabel 4.3	Nilai Impor Menurut HS 2 Digit, 2023	33
Tabel 4.4	Nilai Impor Menurut Pelabuhan Bongkar di Provinsi Kalimantan Utara, 2023.....	34
Tabel 5.1	Jumlah kantor Bank di Provinsi Kalimantan Utara, 2019–2023.....	39
Tabel 5.2	Posisi Dana Simpanan Menurut Bank (Miliar Rupiah), 2021–2023.....	40
Tabel 6.1	Jumlah Penduduk Usia 15+ Menurut Kegiatan Utama di Provinsi Kalimantan Utara, 2021–2023	47

Tabel 6.2	Garis Kemiskinan Menurut Daerah Kota dan Desa (Rupiah/Kapita/Bulan), 2019–2023.....	55
-----------	--	----

<https://kaltara.bps.go.id>

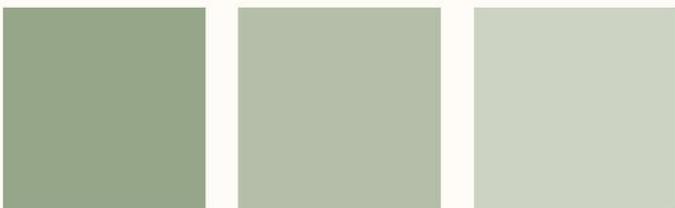
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto Beberapa Lapangan Usaha (persen), 2019–2023	9
Gambar 2.2	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Utara (persen), 2023.....	10
Gambar 2.3	PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara (juta rupiah), 2019–2023	12
Gambar 3.1	Perkembangan Inflasi di Provinsi Kalimantan Utara (persen), 2021–2023	18
Gambar 3.2	Perkembangan Inflasi Bulanan Provinsi Kalimantan Utara (persen), 2023.....	21
Gambar 4.1	Perkembangan Ekspor Melalui Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Utara (Juta US Dolar), 2019–2023.....	26
Gambar 4.2	Ekspor Melalui Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kelompok Barang (persen), 2023	27
Gambar 4.3	Persentase Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan, 2023	30
Gambar 4.4	Perkembangan Impor Provinsi Kalimantan Utara (Juta US Dolar), 2019–2023	31
Gambar 4.5	Perkembangan Impor per Bulan di Provinsi Kalimantan Utara (Juta US Dolar), 2023	32
Gambar 4.6	Persentase Nilai Impor Menurut Negara Asal (persen), 2023.....	35

Gambar 5.1	Dana Simpanan Menurut Jenis Simpanan (Persen), 2023	41
Gambar 5.2	Proporsi Penyaluran Kredit Menurut Penggunaan (persen), Desember 2023	42
Gambar 5.3	Posisi Penyaluran Kredit Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah), Desember 2023	43
Gambar 6.1	Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus) Provinsi Kalimantan Utara (persen), 2019–2023.....	48
Gambar 6.2	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Kalimantan Utara (persen), Agustus 2023.....	50
Gambar 6.3	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Utara (persen), Agustus 2023 ...	51
Gambar 6.4	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Utara (persen), Agustus 2023 ...	52
Gambar 6.5	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara (persen), 2019-2023	54
Gambar 6.6	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara, 2019-2023.....	56
Gambar 6.7	Koefisien Gini Provinsi Kalimantan Utara, 2019–2023 ..	57

BAB 1

RINGKASAN EKSEKUTIF



Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara kian membaik. Tercatat bahwa ekonomi Kalimantan Utara tahun 2023 tumbuh sebesar 4,94 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya nilai tambah pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan utama adalah Pertambangan dan Penggalian. Pertambangan dan Penggalian juga merupakan lapangan usaha yang memberikan share terbesar dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Utara.

Secara spasial, di wilayah Pulau Kalimantan, kontribusi ekonomi Provinsi Kalimantan Utara masih yang terendah dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Perekonomian di Pulau Kalimantan masih didominasi oleh Provinsi Kalimantan Timur dengan share sebesar 48,38 persen. Sementara itu, share Provinsi Kalimantan Utara sebesar 8,45 persen.

Inflasi (year-on-year) Desember 2023 Provinsi Kalimantan Utara (Gabungan Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor) sebesar 2,44 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi (year-on-year) pada Desember 2022. Penurunan ini dipicu penurunan harga terutama pada kelompok transportasi.

Dari sisi perdagangan luar negeri, Provinsi Kalimantan Utara masih mengalami surplus sebesar 2.173,21 juta US Dolar pada tahun 2023. Permintaan ekspor naik 7,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total ekspor melalui pelabuhan di Provinsi Kalimantan tahun 2023 mencapai 2.861,77 juta US Dolar. Sementara itu, nilai impor juga mengalami peningkatan. Nilai impor Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2023 mencapai 688,56 juta US Dolar. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan impor hasil industri, dari 165,81 juta US

Dolar pada 2022 menjadi 589,98 juta US Dolar pada 2023. Selain itu, peningkatan ini juga didorong oleh impor hasil tambang dan hasil pertanian sebesar 3,46 juta US Dolar dan 1,17 juta US Dolar.

Membaiknya kinerja perekonomian memberikan dampak positif terhadap kondisi ketenagakerjaan. Berdasarkan Survei Ketenagakerjaan Nasional yang diselenggarakan pada bulan Agustus, angka pengangguran menurun dari 4,33 persen pada 2022 menjadi 4,01 persen pada 2023. Selain berdampak pada kondisi ketenagakerjaan, membaiknya ekonomi Provinsi Kalimantan Utara juga mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Maret 2023 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin menurun dari 6,77 persen pada 2022 menjadi 6,45 persen pada 2023.



BAB 2

**PERTUMBUHAN
EKONOMI**



Salah satu indikator yang mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan total dari nilai tambah yang tercipta dari seluruh aktivitas ekonomi. Dengan demikian, perubahan angka PDRB menunjukkan naik atau turunnya aktivitas ekonomi pada wilayah tersebut.

Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara (Triliun Rupiah), 2019–2023

PDRB	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Atas Dasar Harga Berlaku	96,51	100,42	111,53	138,67	147,28
Atas Dasar Harga Konstan	61,42	60,75	63,17	66,53	69,82

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, diolah dari berbagai jenis Sensus, Survei, dan Sumber Lainnya

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, secara nominal, PDRB Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami peningkatan, dari 96,51 triliun rupiah pada 2019 menjadi 147,28 triliun rupiah pada 2023. Sementara itu, jika dilihat secara riil atas dasar harga konstan 2010, PDRB Provinsi Kalimantan Utara sempat berkontraksi pada tahun 2020. Hal ini merupakan dampak adanya pandemi COVID-19 yang menghambat kinerja perekonomian pada berbagai sektor.

Setelah lebih dari dua tahun menghadapi pandemi COVID-19, perekonomian Provinsi Kalimantan Utara semakin membaik. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mencapai 4,94 persen, dimana nilai PDRB atas dasar harga konstan meningkat dari 66,53 triliun rupiah pada 2022 menjadi 69,82 triliun rupiah pada 2023.

Tabel 2.2 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Utara, 2023

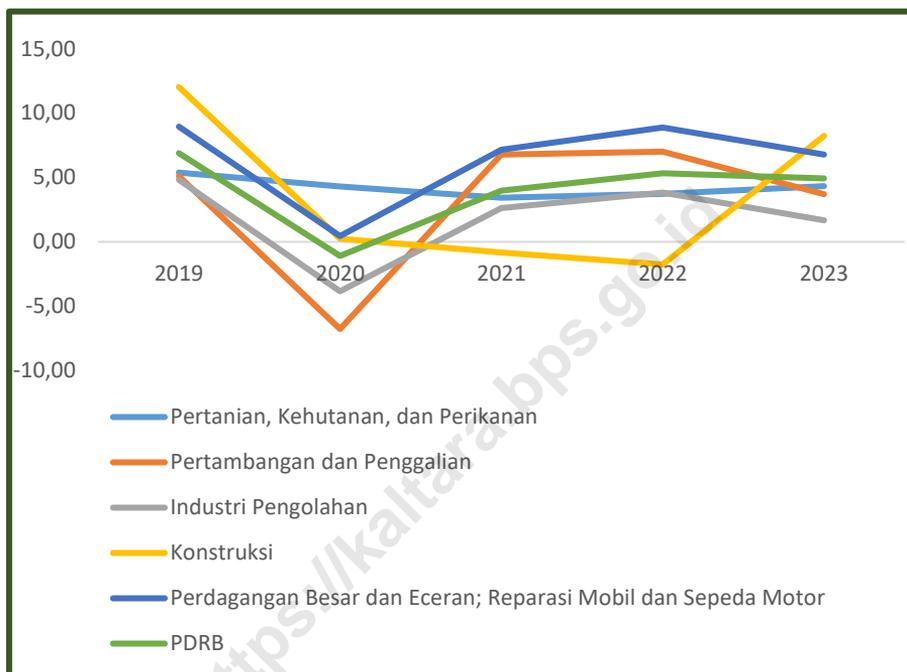
Lapangan Usaha	Distribusi** (%)
(1)	(2)
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	14,23
Pertambangan dan Penggalian	34,18
Industri Pengolahan	7,67
Pengadaan Listrik dan Gas	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,05
Konstruksi	11,45
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,60
Transportasi dan Pergudangan	7,04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,45
Informasi dan Komunikasi	2,46
Jasa Keuangan	1,09
Real Estate	0,61
Jasa Perusahaan	0,19
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,02
Jasa Pendidikan	2,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,94
Jasa Lainnya	0,67

Catatan: ** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, diolah dari berbagai jenis Sensus, Survei, dan Sumber Lainnya

Dilihat dari sisi lapangan usaha, perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara masih ditopang empat lapangan usaha dengan share terbesar, yaitu Pertambangan dan Penggalian (34,18 persen), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (14,23 persen), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,60 persen), dan Konstruksi (11,45 persen). Keempat kategori lapangan usaha ini

memberikan kontribusi lebih dari dua pertiga dari total PDRB. Sementara itu, lapangan usaha lainnya, masing-masing mempunyai distribusi kurang dari 10 persen.



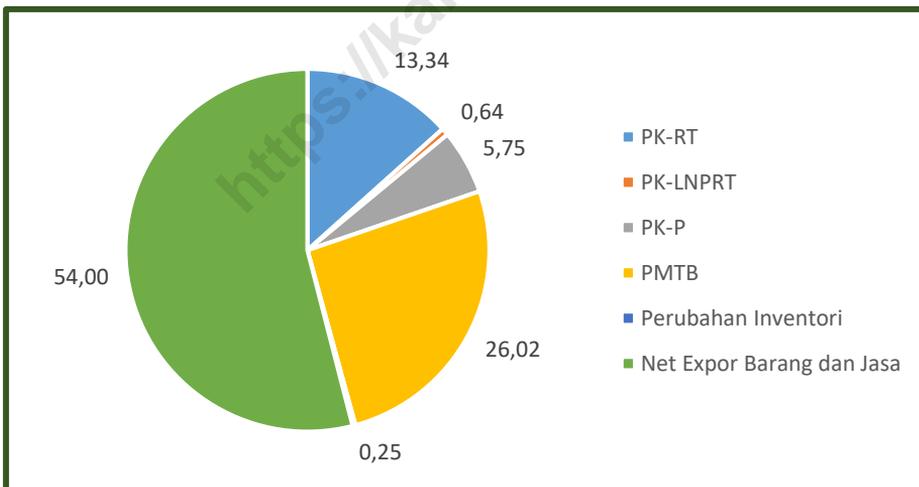
Sumber: BPS, diolah dari berbagai jenis Sensus, Survei, dan Sumber Lainnya

Gambar 2.1 *Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto Beberapa Lapangan Usaha (persen), 2019–2023*

Gambar 2.1 menunjukkan pertumbuhan nilai tambah bruto beberapa lapangan usaha dengan kontribusi terbesar serta total PDRB. Tingginya peranan kelima lapangan usaha ini menyebabkan arah pertumbuhan PDRB sangat bergantung dengan naik turunnya aktivitas ekonomi lapangan usaha tersebut. Dari kelima lapangan usaha ini, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami

peningkatan. Hal ini lah yang mendorong tumbuhnya ekonomi Provinsi Kalimantan Utara pada 2023, walaupun ekonomi Kalimantan Utara tahun 2023 tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun 2022.

Selain didukung oleh kelima kategori lapangan usaha dengan share yang besar, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara tahun 2023 juga didukung adanya peningkatan pada lapangan usaha lainnya. Seluruh lapangan usaha lainnya juga mengalami peningkatan nilai tambah pada tahun 2023. Beberapa lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 diantaranya Pengadaan Listrik dan Gas (18,58 persen), Jasa Keuangan dan Asuransi (12,38 persen), serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (8,24 persen).



Sumber: BPS, diolah dari berbagai jenis Sensus, Survei, dan Sumber Lainnya

Gambar 2.2 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Utara (persen), 2023

Dari sisi pengeluaran, PDRB terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Lembaga

Non-Profit (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori, dan Net Ekspor Barang dan Jasa. Komponen penyusun PDRB Provinsi Kalimantan Utara yang terbesar adalah Net Ekspor Barang dan Jasa (54,00 persen), dimana komoditas ekspor utama Provinsi Kalimantan Utara adalah batubara. Komponen dengan kontribusi terbesar selanjutnya yaitu, PMTB (26,02 persen). Sementara itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya berkontribusi sebesar 13,34 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 5,75 persen, dan sisanya, pengeluaran konsumsi LNPRT dan perubahan inventori masing-masing memiliki kontribusi kurang dari satu persen.

Tabel 2.3 Pertumbuhan Komponen Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Utara (persen), 2021–2023

Komponen	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)
PK-RT	2,98	4,46	5,74
PK-LNPRT	-0,93	4,72	9,99
PK-P	-1,30	-0,18	5,56
PMTB	0,65	2,37	9,13
Perubahan Inventori	–	–	–
Ekspor Barang dan Jasa	14,45	7,14	2,41
Impor Barang dan Jasa	20,50	6,19	2,71

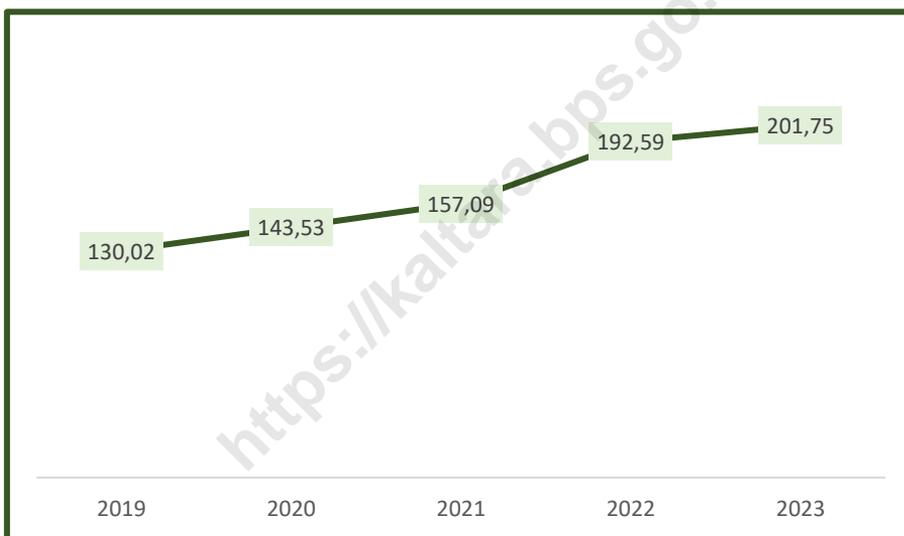
Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, diolah dari berbagai jenis Sensus, Survei, dan Sumber Lainnya

Pergerakan pertumbuhan setiap komponen PDRB pengeluaran cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Seluruh komponen PDRB pengeluaran tumbuh positif pada 2023. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PKLNPRT yang meningkat hingga 9,99 persen.

Komponen ekspor mengalami pertumbuhan sebesar 2,41 persen. Komponen Impor, yang merupakan komponen pengurang dalam PDRB, tumbuh sebesar 2,71 persen. Komponen PMTB, sebagai komponen yang memiliki peranan terbesar kedua, tumbuh sebesar 9,13 persen. Selanjutnya, Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah juga naik masing-masing sebesar 5,74 persen dan 5,56 persen.



Sumber: BPS, diolah dari berbagai jenis Sensus, Survei, dan Sumber Lainnya

Gambar 2.3 PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara (juta rupiah), 2019–2023

Untuk melihat gambaran rata-rata pendapatan per satu orang penduduk dalam satu tahun, dapat dihitung PDRB per kapita. PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2023, PDRB per kapita di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 201,75 juta rupiah.

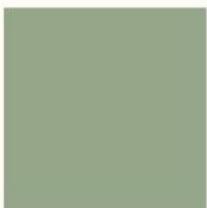
Walaupun PDRB per kapita di Provinsi Kalimantan Utara terbilang tinggi, hal ini tidak dapat serta merta menjadi tolok ukur kesejahteraan seluruh masyarakat. Alasannya, PDRB per kapita dihitung dengan membagi rata PDRB dengan jumlah penduduk tanpa memperhitungkan distribusi pendapatan, yang artinya setiap masyarakat dianggap memiliki pendapatan yang sama.

<https://kaltara.bps.go.id>



BAB 3

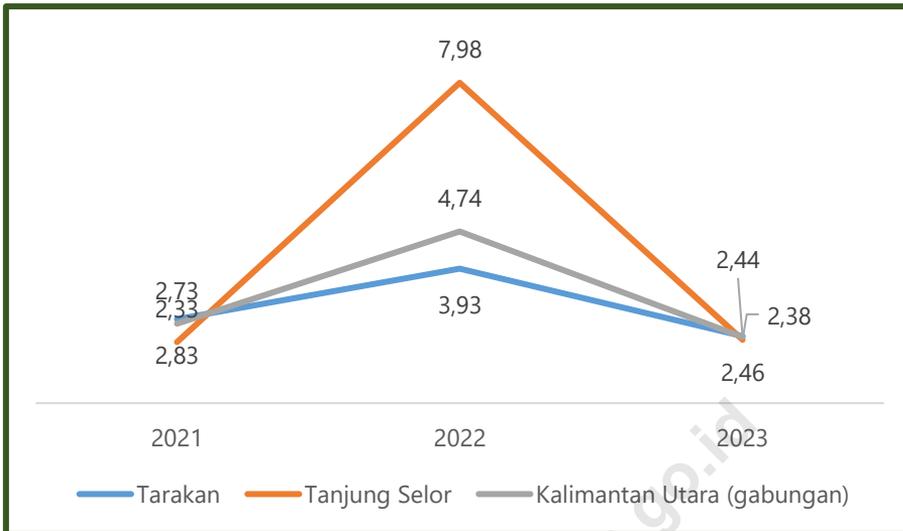
**PERKEMBANGAN
HARGA-HARGA**



Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam berbagai pengambilan kebijakan. Inflasi berkaitan erat dengan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi makro. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung terus menerus. Inflasi menyebabkan daya beli suatu mata uang akan menjadi lebih rendah atau menurun. Akibatnya, kemampuan masyarakat berpendapatan tetap dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa akan semakin berkurang.

Inflasi dinyatakan dalam persentase dan bernilai positif, sebaliknya apabila inflasi bernilai negatif, harga barang dan jasa sedang mengalami penurunan dan disebut deflasi. Inflasi dapat memberikan dampak positif dan negatif, tergantung pada besaran inflasi tersebut. Inflasi yang terkontrol akan membawa dampak positif bagi perekonomian.

Pengukuran inflasi didasarkan pada Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK disusun berdasarkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Mulai tahun 2020, penghitungan inflasi di Provinsi Kalimantan Utara tidak hanya dilakukan di Kota Tarakan, tetapi juga Tanjung Selor. Selanjutnya, penghitungan IHK untuk Provinsi Kalimantan Utara (gabungan) dilakukan dengan rata-rata IHK Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor yang ditimbang melalui bobot hasil Survei Biaya Hidup (SBH), sedangkan penghitungan inflasi sama dengan teknik dan prosedur penghitungan inflasi Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor.



Sumber: BPS, diolah dari berbagai jenis Sensus, Survei, dan Sumber Lainnya

Gambar 3.1 Perkembangan Inflasi di Provinsi Kalimantan Utara (persen), 2021-2023

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, inflasi di Provinsi Kalimantan Utara, baik Tarakan maupun Tanjung Selor terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, inflasi Provinsi Kalimantan Utara (gabungan) juga mengalami fluktuasi. Inflasi Provinsi Kalimantan Utara pada 2023 mencapai 2,44 persen. Sementara itu, inflasi Kota Tarakan sebesar 2,46 persen dan Tanjung Selor sebesar 2,38 persen. Inflasi di Tanjung Selor tahun 2023 berada di urutan kedelapan jika dibandingkan dengan seluruh kota inflasi di Pulau Kalimantan.

Pada inflasi (year on year) Kalimantan Utara tahun 2023, sebagian besar kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan dua kelompok mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran dengan inflasi tertinggi adalah kelompok pengeluaran transportasi (5,10 persen), selanjutnya perawatan pribadi dan jasa lainnya (4,50 persen), makanan, minuman, dan tembakau (3,70 persen), dan penyediaan makanan dan minuman

(1,07 persen), sementara kelompok pengeluaran lainnya mengalami inflasi di bawah satu persen. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; serta pakaian dan alas kaki dengan persentase masing-masing -0,17 persen dan -0,08 persen. Inflasi tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Inflasi Kalimantan Utara (gabungan) Menurut Kelompok Pengeluaran, 2023

Kelompok Pengeluaran	Inflasi (%)
(1)	(2)
Umum	2,44
Makanan, Minuman, Tembakau	3,70
Pakaian dan Alas Kaki	-0,08
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lain	0,96
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,17
Kesehatan	0,85
Transportasi	5,10
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,16
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,24
Pendidikan	0,36
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,07
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,50

Sumber: BPS, diolah dari berbagai jenis Sensus, Survei, dan Sumber Lainnya

Dilihat menurut jenis barang dan jasa, angkutan udara merupakan penyumbang inflasi tertinggi pada tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Utara dengan sumbangan inflasi sebesar 0,65 persen. Selanjutnya, beras memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,56 persen, dan cabai rawit

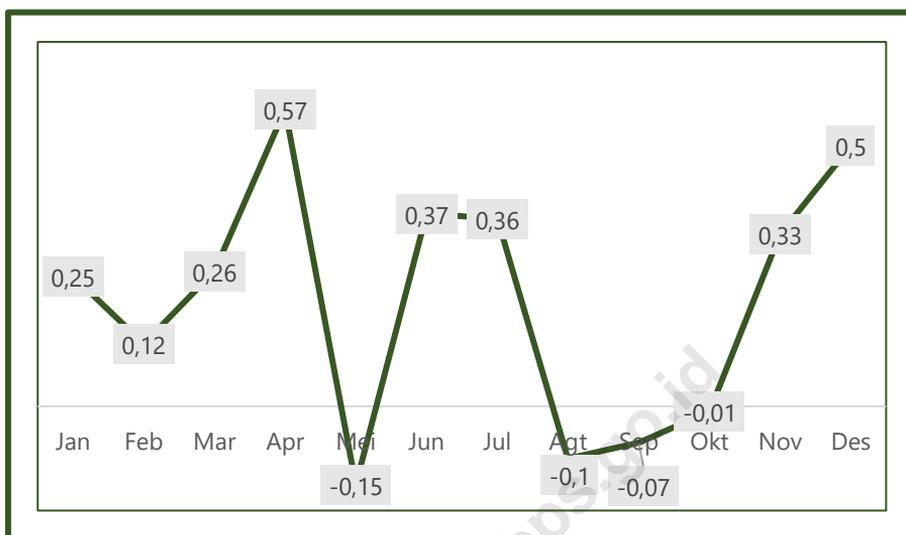
sebesar 0,48 persen. Sumbangan inflasi beberapa komoditas lain selengkapnya pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Sumbangan Inflasi Beberapa Komoditas yang Dominan terhadap Inflasi Provinsi Kalimantan Utara, 2023

Kelompok Pengeluaran	Sumbangan Inflasi (%)
(1)	(2)
Angkutan Udara	0,65
Beras	0,56
Cabai Rawit	0,48
Emas Perhiasan	0,26
Cabai Merah	0,20
Rokok Kretek Filter	0,10
Rokok Putih	0,09
Angkutan Laut	0,08
Bahan Bakar Rumah Tangga	0,07
Kayu Lapis	0,06

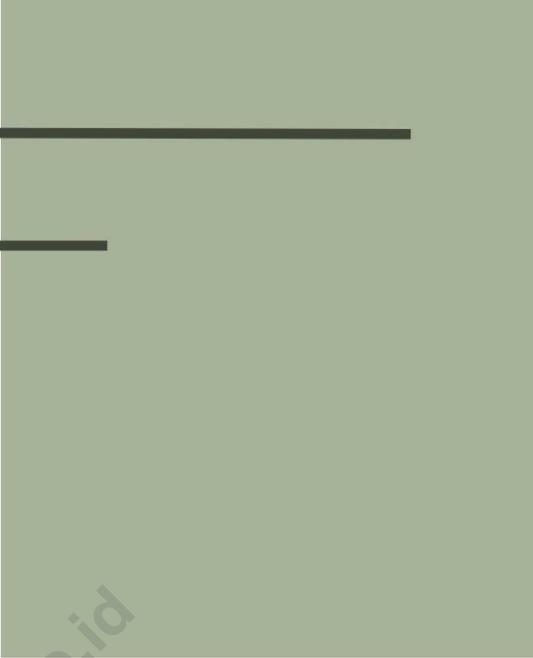
Sumber: BPS, diolah dari berbagai jenis Sensus, Survei, dan Sumber Lainnya

Jika dirinci setiap bulan, pola pergerakan inflasi bulanan Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2023 cukup berfluktuatif. Terjadi deflasi pada beberapa bulan, yaitu pada bulan Mei (-0,15 persen), Agustus (-0,10 persen), September (-0,07 persen), dan Oktober (-0,01 persen), sementara pada bulan-bulan lainnya terjadi inflasi. Inflasi tertinggi pada bulan April, mencapai 0,57 persen.



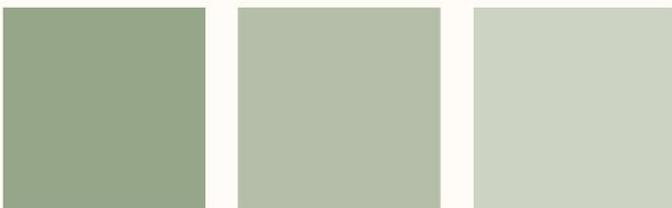
Sumber: BPS, diolah dari berbagai jenis Sensus, Survei, dan Sumber Lainnya

Gambar 3.2 Perkembangan Inflasi Bulanan Provinsi Kalimantan Utara (persen), 2023



BAB 4

**PERDAGANGAN
LUAR NEGERI**



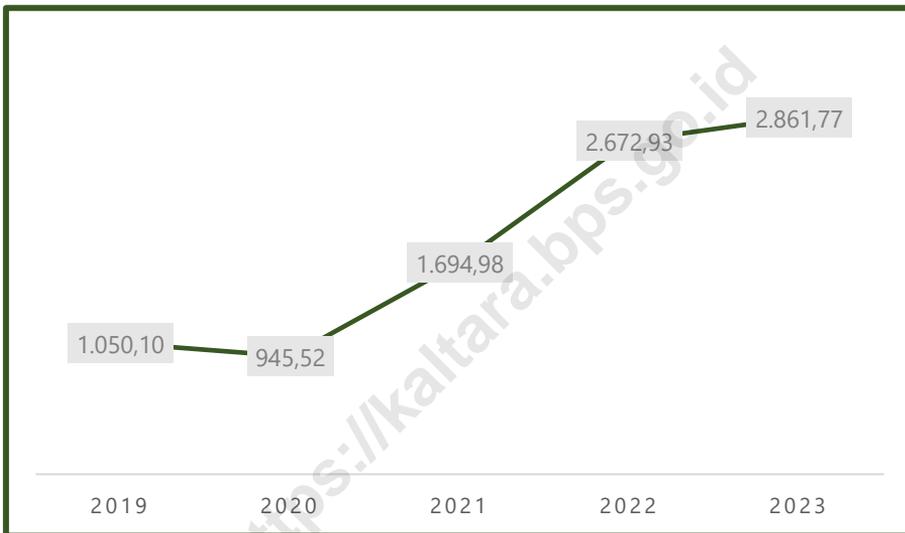
Gagasan utama dari perdagangan luar negeri adalah kenyataan bahwa tidak ada suatu daerah pun yang dapat memproduksi seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perekonomian suatu negara atau wilayah menjadi praktis terbuka dan terjalin dengan wilayah luar atau internasional.

Perdagangan luar negeri yang terbagi atas dua aktivitas, ekspor dan impor, merupakan agen penyumbang pertumbuhan ekonomi bagi suatu wilayah. Ekspor memungkinkan suatu negara untuk melakukan realokasi 'barang dan jasa kelebihan' yang dimiliki secara efisien sehingga mendorong produktivitas dan memperluas pasaran. Sedangkan impor membantu suatu wilayah untuk memenuhi permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi oleh wilayah itu sendiri.

Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan luar negeri, ekspor luar negeri memberikan kontribusi yang cukup besar pada perekonomian Kalimantan Utara. Dilihat dari kontribusinya pada PDRB, kontribusi ekspor luar negeri telah melebihi kontribusi komponen konsumsi rumah tangga.

Selama 2019-2023, perkembangan ekspor di Provinsi Kalimantan Utara cukup berfluktuatif. Pada tahun 2019 nilai ekspor mengalami penurunan. Penurunan ini berlanjut hingga 2020. Turunnya nilai ekspor pada tahun 2020 utamanya disebabkan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan turunnya permintaan dari negara tujuan ekspor dan adanya berbagai pembatasan yang menghambat kegiatan perdagangan luar negeri. Walaupun demikian, seiring penanganan COVID-19 dan mulai pulihnya perekonomian, aktivitas ekspor terlihat

membaik mulai 2021 hingga 2023. Secara kumulatif, nilai ekspor melalui pelabuhan di Provinsi Kalimantan pada 2023 mencapai 2.861,77 juta US Dolar, meningkat hingga 7,06 persen dibandingkan nilai ekspor tahun 2022. Peningkatan ini didorong oleh naiknya permintaan ekspor dari negara-negara tujuan.

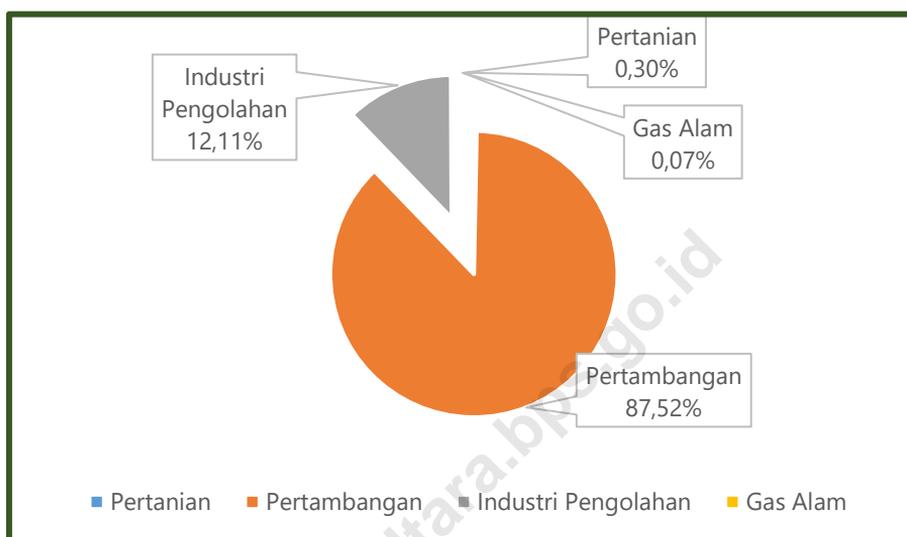


Sumber: Dokumen PEB/Kantor POS, catatan instansi, survei perdagangan lintas batas laut

Gambar 4.1 Perkembangan Ekspor Melalui Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Utara (Juta US Dolar), 2019-2023

Dilihat menurut kelompok barang, ekspor melalui pelabuhan di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2023, seluruhnya merupakan barang non migas, yang terdiri dari hasil industri, hasil pertambangan, hasil pertanian, dan gas alam. Diantara keempatnya, yang terbesar adalah nilai ekspor hasil pertambangan, sebesar 2.504,78 juta US Dolar atau 87,53 persen dari total ekspor. Ekspor hasil industri memberikan peranan 12,11 persen dari total ekspor atau sebesar 346,57 juta US

Dolar, sedangkan hasil pertanian hanya 8,47 juta US Dolar (0,30 persen), dan sisanya adalah gas alam sebesar 1,94 juta US Dolar (0,07 persen).



Sumber: Dokumen PEB/Kantor POS, catatan instansi, survei perdagangan lintas batas laut

Gambar 4.2 Ekspor Melalui Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kelompok Barang (persen), 2023

Secara lebih rinci, ekspor di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat menurut golongan barang Harmonized System (HS) dua digit. Golongan barang yang mempunyai nilai ekspor terbesar adalah bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingannya; zat mengandung bitumen; malam mineral sebesar 2.511,36 juta US Dolar. Tembakau dan pengganti tembakau dipabrikasi menempati urutan kedua terbesar dengan nilai ekspor sebesar 249,98 juta US Dolar. Selanjutnya, kayu dan barang dari kayu, arang kayu sebesar 48,87 juta US Dolar; ikan dan krustasea, moluska serta invertebrate air lainnya

sebesar 44,18 juta US Dolar; sementara golongan barang lain memiliki nilai ekspor kurang dari satu juta US Dolar.

Tabel 4.1 Nilai Ekspor Menurut HS 2 Digit, 2023

HS	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)	Peranan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
27	Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingannya; zat mengandung bitumen; malam mineral	2.511,36	87,76
24	Tembakau dan pengganti tembakau dipabrikasi	249,98	8,74
44	Kayu dan barang dari kayu; arang kayu	48,87	1,71
3	Ikan dan krustasea, moluska serta invertebrate air lainnya	44,18	1,54
14	Bahan anyaman nabati; produk nabati tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	0,53	0,02
16	Olahan dari daging, ikan, krustacea, moluska atau invertebrate air lainnya	0,46	0,02
12	Biji dan buah mengandung minyak; bermacam-macam butir; biji dan buah; tanaman industri atau tanaman obat; jerami dan makanan ternak	0,52	0,02
29	Bahan kimia organik	0,04	~0,00
8	Buah dan buah bertempurung yang dapat dimakan; kulit dari buah jeruk dan melon	0,20	0,01
9	Kopi, teh, mate, dan rempah-rempah	0,02	~0,00
Total 10 Golongan Barang		2.856,15	99,80
	Lainnya	5,62	0,20
Jumlah		2.861,77	100,00

Sumber: Dokumen PEB/Kantor POS, catatan instansi, survei perdagangan lintas batas laut

Ekspor Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 disalurkan melalui lima pelabuhan dan satu bandara yang berada di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Di antara kelima pelabuhan dan

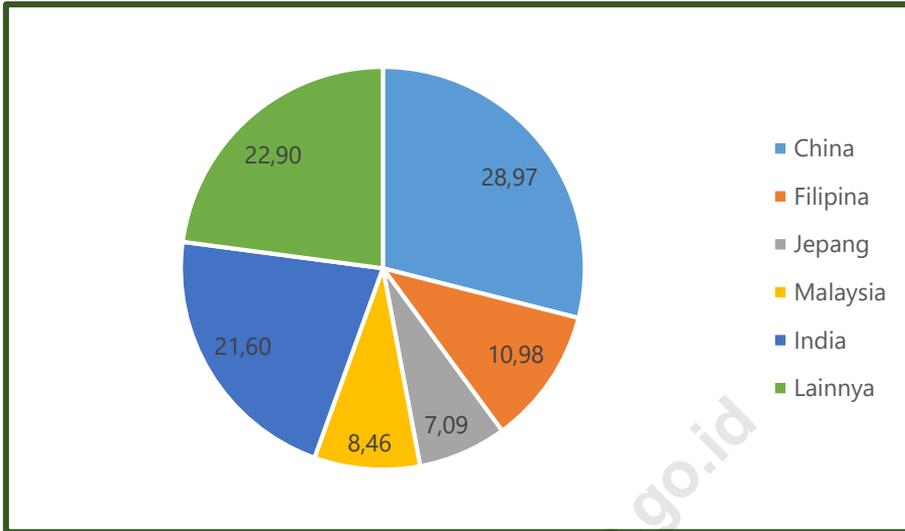
satu bandara yang tersebar pada tiga kabupaten/kota tersebut, Pelabuhan Lingkas Tarakan memuat sekitar 65,71 persen dari total nilai ekspor Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai mencapai 2,10 Miliar US Dolar. Secara lengkap, besarnya ekspor pada setiap pelabuhan dan bandara di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Nilai Ekspor Menurut Pelabuhan Muat di Provinsi Kalimantan Utara, 2023

No.	Pelabuhan	Berat (Ton)	Nilai (US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanjung Selor	4.222.058,12	167.583.035,68
2	Lingkas Tarakan	22.762.982,12	2.097.985.456,59
3	Nunukan	2.379.775,51	429.832.943,97
4	Bunyu	5.259.029,30	163.969.115,69
5	Bandara Juata Tarakan	16.623,87	2.064.172,11
6	Juata Tarakan (Laut)	43,20	333.000,00

Sumber: Dokumen PEB/Kantor POS, catatan instansi, survei perdagangan lintas batas laut

Dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya produk ekspor ditujukan ke berbagai negara. Selama tahun 2023, negara tujuan ekspor terbesar adalah China dengan total ekspor senilai 828,99 juta US Dolar. Selanjutnya, diikuti India dengan total ekspor senilai 618,21 juta US Dolar, Filipina dengan total ekspor 314,28 juta US Dolar, Malaysia dengan total ekspor 242,00 juta US Dolar, dan Jepang dengan total ekspor 202,76 juta US Dolar, sementara untuk negara tujuan lain masing-masing bernilai kurang dari 200 juta US Dolar.

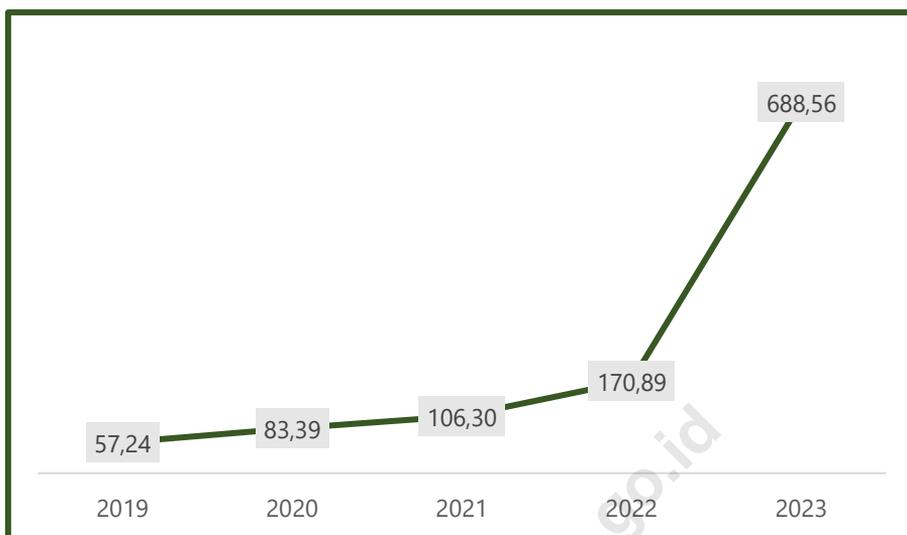


Sumber: Dokumen PEB/Kantor POS, catatan instansi, survei perdagangan lintas batas laut

Gambar 4.3 *Persentase Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan, 2023*

Di samping kegiatan ekspor, Provinsi Kalimantan Utara juga melakukan impor dari wilayah lain untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Walaupun demikian, nilai ekspor jauh lebih tinggi dibandingkan nilai impor. Oleh karena itu, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Utara selalu mengalami surplus. Tahun 2023, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Utara tercatat mengalami surplus sebesar 2.173,21 juta US Dolar.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) nilai impor cenderung semakin meningkat, dari 57,24 juta US Dolar pada 2019 menjadi 688,56 juta US Dolar pada 2023. Dibandingkan tahun 2022, ekspor Kalimantan Utara pada 2023 mengalami kenaikan hingga 302,92 persen.



Sumber: Dokumen PEB/Kantor POS, catatan instansi, survei perdagangan lintas batas laut

Gambar 4.4 Perkembangan Impor Provinsi Kalimantan Utara (Juta US Dolar), 2019–2023



Sumber: Dokumen PEB/Kantor POS, catatan instansi, survei perdagangan lintas batas laut

Gambar 4.5 Perkembangan Impor per Bulan di Provinsi Kalimantan Utara (Juta US Dolar), 2023

Jika dilihat per bulan, aktivitas impor sangat fluktuatif. Nilai impor tertinggi terjadi pada bulan Agustus, mencapai 107,56 juta US Dolar. Kenaikan ini dipicu oleh impor barang hasil industri, yang mulai meningkat signifikan pada bulan Juli. Sementara itu, impor terendah terjadi pada bulan Maret, sebesar 14,45 juta US Dolar.

Impor di Provinsi Kalimantan Utara didominasi barang-barang non migas. Selama tahun 2023, impor barang migas hanya menyumbang 0,40 persen sehingga sebagian besar impor yang dilakukan berasal dari barang non migas. Kelompok barang non migas, terdiri dari sektor industri pengolahan, pertambangan, dan pertanian. Secara lebih detail, impor Provinsi Kalimantan Utara menurut kelompok barang sesuai kode HS dua digit dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Nilai Impor Menurut HS 2 Digit, 2023

HS	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)	Peranan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
84	Reaktor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis; bagian daripadanya	460,04	66,81
24	Tembakau dan pengganti tembakau dipabrikasi	135,44	19,67
73	Barang dari besi atau baja	31,91	4,64
85	Mesin dan perlengkapan elektris serta bagiannya; perekam dan pereproduksi suara/gambar dan suara televisi, dan bagian serta aksesoris dari barang tersebut	10,34	1,50
68	Barang dari batu, plester, semen, asbes, mika atau bahan semacam itu	9,55	1,39
89	Kapal, perahu dan struktur terapung	8,95	1,30
27	Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingannya; zat mengandung bitumen; malam mineral	2,76	0,40
87	Kendaraan selain yang bergerak diatas rel kereta api, dan bagian serta aksesorinya	2,56	0,37
	Lainnya	27,01	3,92
	Jumlah	688,56	100,00

Sumber: Dokumen PEB/Kantor POS, catatan instansi, survei perdagangan lintas batas laut

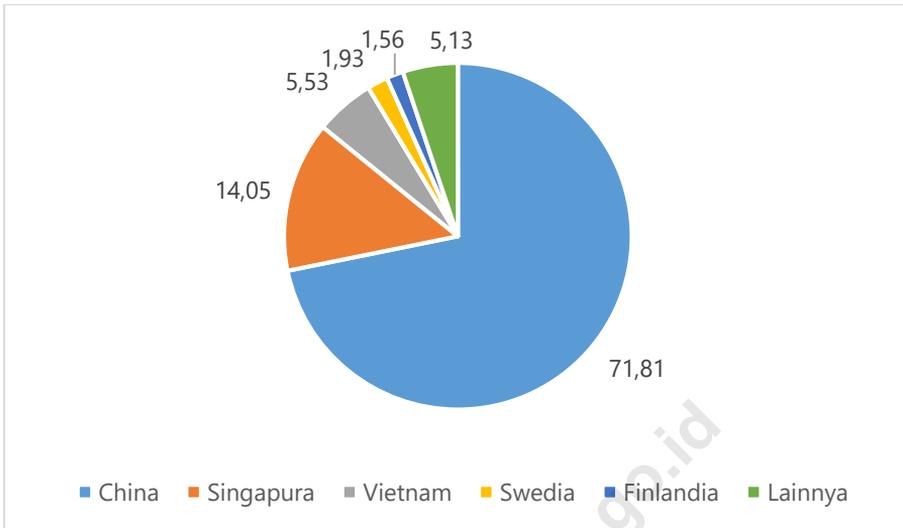
Barang impor yang masuk di Kalimantan Utara melalui beberapa pintu masuk, diantaranya Tanjung Selor, Lingkas Tarakan, Nunukan, Bandara Juwata Tarakan, Juata, dan Lainnya. Pelabuhan dengan nilai impor terbesar adalah pelabuhan Lingkas Tarakan, sebesar 543,58 juta US Dolar.

Tabel 4.4 Nilai Impor Menurut Pelabuhan Bongkar di Provinsi Kalimantan Utara, 2023

No.	Pelabuhan	Berat (Ton)	Nilai (US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanjung Selor	61.191,99	3.204.230
2	Lingkas Tarakan	309.009,85	543.579.469
3	Nunukan	156.229,25	124.667.058
4	Bunyu	4.000,00	29.534
5	Bandara Juwata	84.015,02	10.673.014
6	Lainnya	3.764,00	6.402.667

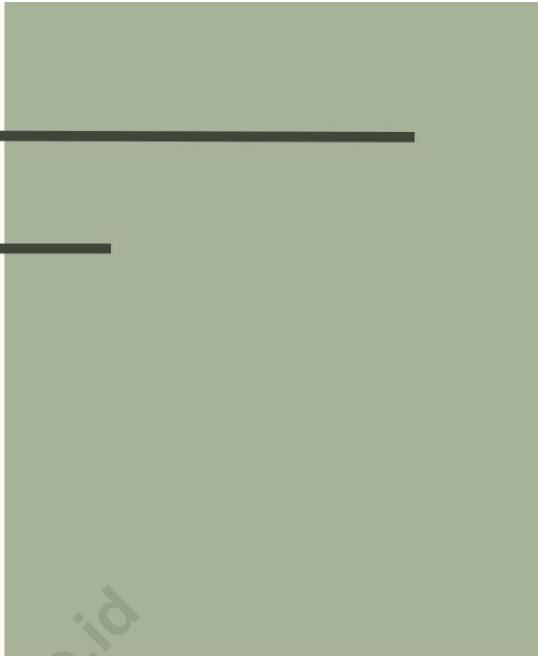
Sumber: Dokumen PEB/Kantor POS, catatan instansi, survei perdagangan lintas batas laut

Barang-barang impor di Provinsi Kalimantan Utara berasal dari beberapa negara antara lain China, Singapura, Vietnam, Swedia, Finlandia, Arab, Rusia dan Jepang. Selama tahun 2023, nilai impor terbesar berasal dari China, mencapai 494,42 juta US Dolar. Selanjutnya diikuti dengan Singapura total impor senilai 96,72 juta US Dolar, Vietnam dengan total impor senilai 38,09 juta US Dolar, Swedia dengan total impor senilai 13,27 US Dolar, Finlandia dengan total impor senilai 10,73 juta US Dolar, dan lainnya masing-masing kurang dari delapan juta US Dolar.



Sumber: Dokumen PEB/Kantor POS, catatan instansi, survei perdagangan lintas batas laut

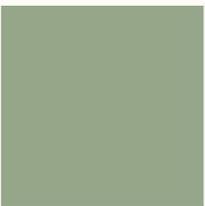
Gambar 4.6 Persentase Nilai Impor Menurut Negara Asal (persen), 2023



BAB 5

PERBANKAN

<http://kaltara.bps.go.id>



Dalam rangka menciptakan perekonomian yang bertumbuh dan kuat, selain melalui dorongan pada sektor riil, perlu adanya pengendalian juga melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Dari sektor moneter, perbankan mempunyai peran yang penting, terutama dalam menopang aktivitas sektor riil. Sektor riil, seperti pertambangan misalnya, membutuhkan bantuan perbankan dari segi pembiayaan. Adanya pembiayaan yang cukup akan memperlancar kinerja sektor riil, yang secara langsung atau tidak langsung nantinya juga akan berdampak pada kinerja perbankan.

Tabel 5.1 Jumlah kantor Bank di Provinsi Kalimantan Utara, 2019–2023

Status Kantor	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank Konvensional	107	107	107	136	136
Bank Umum	–	–	–	–	–
Pemerintah	46	46	46	72	72
Bank Pemerintah Daerah	43	43	43	50	50
Bank Swasta Nasional	16	16	16	12	12
Bank Asing dan Campuran	–	–	–	–	–
<i>Bank Perkreditan Rakyat</i>	2	2	2	2	2
Bank Syariah	4	4	4	4	4
Jumlah	111	111	111	140	140

Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara

Untuk menunjang aktivitas sektor riil di Provinsi Kalimantan Utara, telah terdapat sejumlah kantor bank. Data tahun 2019-2021 menunjukkan tidak ada penambahan jumlah kantor bank. Namun, pada tahun 2022-2023, terdapat sejumlah penambahan dan pengurangan kantor bank. Secara umum, pada tahun 2022 dan 2023, tercatat

terdapat 140 kantor, dimana terjadi penambahan jumlah pada kantor bank pemerintah dan pengurangan pada kantor bank swasta nasional. Jika dirincikan, kantor bank di Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 136 bank konvensional (72 bank pemerintah, 50 bank pemerintah daerah, 12 bank swasta nasional, dan 2 bank perkreditan rakyat) dan 4 bank syariah.

Tabel 5.2 Posisi Dana Simpanan Menurut Bank (Miliar Rupiah), 2021–2023

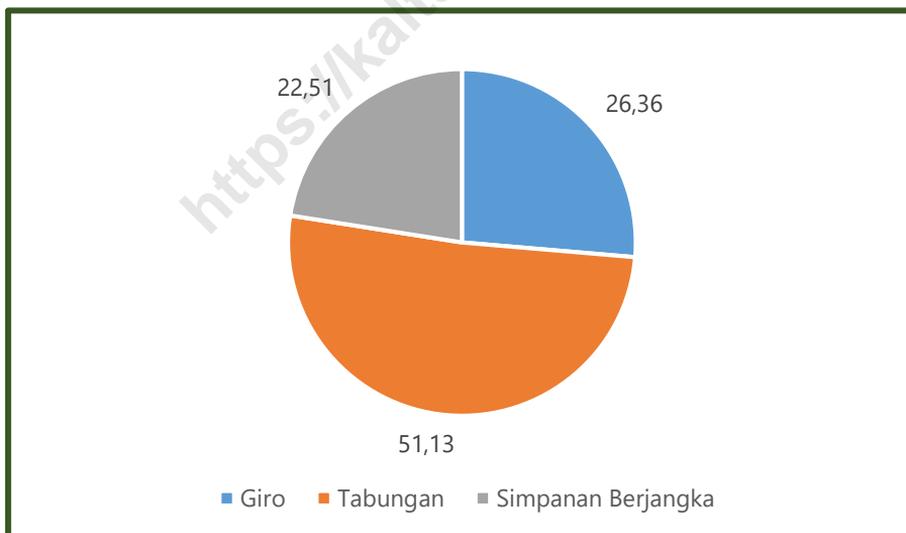
Jenis Bank		2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)
Bank Pemerintah		12.218,48	13.980,55	15.434,91
	Rupiah	11.434,13	13.198,59	14.365,92
	Valuta	784,35	781,96	1.068,99
Bank Swasta Nasional		2.288,20	2.383,56	2.719,55
	Rupiah	2.228,74	2.327,56	2.647,58
	Valuta	59,46	56,00	71,97
Bank Perkreditan Rakyat		32,60	47,21	76,08
	Rupiah	32,60	47,21	76,08
	Valuta	–	–	–
Jumlah		14.539,28	16.411,32	18.230,54
	Rupiah	13.695,47	15.573,36	17.089,58
	Valuta	843,81	837,96	1.140,96

Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara

Kinerja perbankan yang ada dapat dinilai dengan berbagai indikator, salah satunya yaitu dana masyarakat yang dapat dihimpun sebagai simpanan. Jumlah dana simpanan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Total dana simpanan seluruh bank di Provinsi Kalimantan Utara pada 2023 mencapai 18,23 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, posisi dana simpanan terbanyak terdapat pada bank

pemerintah, sebesar 14,37 triliun atau sekitar 79 persen dari seluruh dana simpanan di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu, posisi dana simpanan paling sedikit terdapat pada bank perkreditan rakyat, sebesar 76,08 miliar rupiah.

Dana simpanan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu tabungan, simpanan berjangka, dan giro. Tabungan merupakan produk simpanan bank yang penyetoran ataupun penarikan dananya dapat dilakukan kapan saja. Berbeda dengan tabungan, pada simpanan berjangka, penarikan pada simpanan berjangka hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu. Sementara itu, giro serupa dengan tabungan namun untuk penarikannya melalui cek/bilyet giro.



Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara

Gambar 5.1 Dana Simpanan Menurut Jenis Simpanan (Persen), 2023

Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara lebih banyak memilih menyimpan dana mereka di bank dalam bentuk tabungan. Terbukti, sekitar 51,13 persen dana simpanan pada bank berwujud tabungan. Hal

ini disebabkan fleksibilitas penyetoran dan penarikan uang dalam bentuk tabungan sehingga memudahkan masyarakat dalam menyimpan ataupun menggunakan kembali uang simpanannya. Selanjutnya, sekitar 26,36 persen dana simpanan di Provinsi Kalimantan Utara berupa giro dan sisanya, 22,51 persen berupa simpanan berjangka.

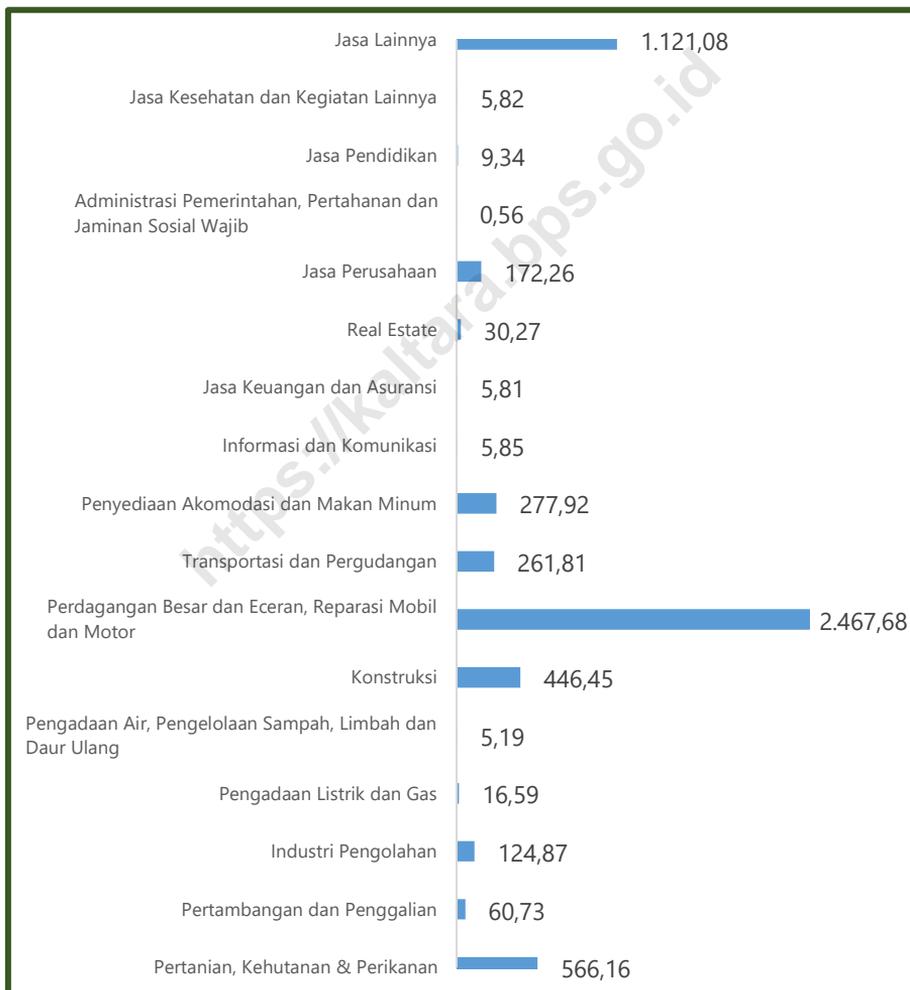


Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara

Gambar 5.2 Proporsi Penyaluran Kredit Menurut Penggunaan (persen), Desember 2023

Selain dana simpanan, kinerja bank juga dapat ditinjau melalui penyaluran kredit. Penyaluran kredit melalui perbankan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan trend yang positif selama tahun 2018 hingga 2022. Total posisi penyaluran kredit pada Desember 2023 mencapai 5,58 triliun rupiah. Jika dilihat menurut penggunaannya, terdapat sedikit perbedaan penggunaan kredit pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Sebelumnya, terdapat perbedaan yang

signifikan diantara proporsi penggunaan kredit untuk investasi atau modal kerja. Pada tahun 2022, setengah dari total penggunaan kredit digunakan untuk investasi, sementara sisanya untuk modal kerja (37,46 persen) dan konsumsi (12,00 persen). Sedangkan di tahun 2023, sebanyak 71,22 persen dari total penggunaan kredit untuk modal kerja.



Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara

Gambar 5.3 Posisi Penyaluran Kredit Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah), Desember 2023

Penggunaan penyaluran kredit di Provinsi Kalimantan Utara dapat juga dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha dan bukan lapangan usaha (tempat tinggal, ruko, kendaraan bermotor, dan lain-lain). Pada tahun 2023, lapangan usaha yang paling banyak menerima penyaluran kredit adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor yang mencapai 2,47 triliun rupiah. Sementara itu, sektor pertambangan sebagai sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Utara menerima kredit yang lebih kecil, yaitu hanya sebesar 60,73 miliar rupiah. Lapangan usaha yang menerima kredit paling kecil adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, hanya 555 juta rupiah.

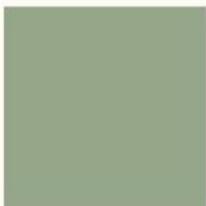


BAB 6

KETENAGAKERJAAN

DAN

KEMISKINAN



Tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat. Terciptanya kondisi perekonomian yang membaik diharapkan akan membawa masyarakat menuju kualitas hidup yang lebih baik. Seringkali adanya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tidak dibarengi dengan peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, di samping indikator ekonomi, indikator lain, indikator sosial misalnya, harus ikut menjadi fokus utama dalam pembangunan.

Beberapa indikator sosial dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Indikator tersebut diantaranya adalah indikator terkait ketenagakerjaan. Semakin banyaknya masyarakat yang terserap dalam lapangan kerja, mengindikasikan bahwa masyarakat hidup semakin sejahtera karena adanya kesempatan kerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Tabel 6.1 Jumlah Penduduk Usia 15+ Menurut Kegiatan Utama di Provinsi Kalimantan Utara, 2021–2023

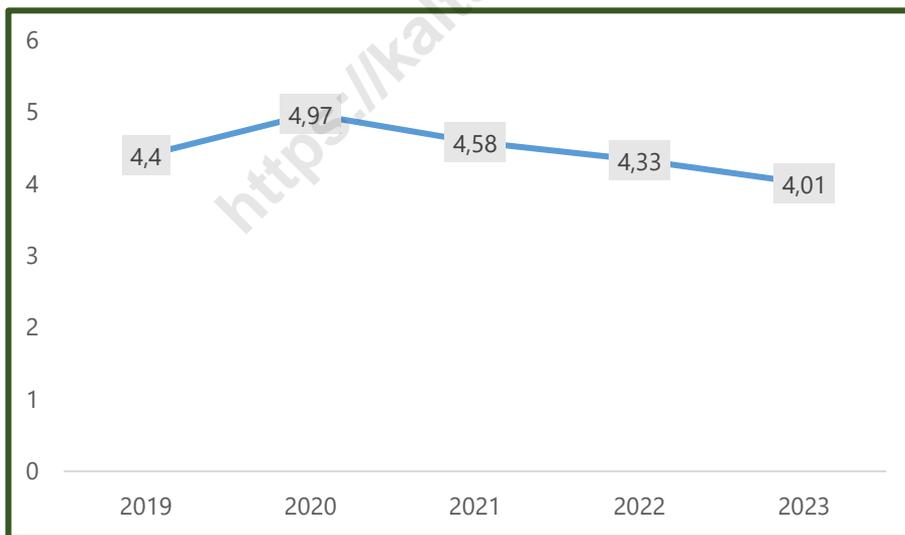
Uraian	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Angkatan Kerja	354.376	370.012	387.823
• Bekerja	338.152	353.984	372.270
• Pengangguran	16.224	16.028	15.553
B. Bukan Angkatan Kerja	180.631	177.158	163.449
TPAK (%)	66,24	67,62	70,35
TPT (%)	4,58	4,33	4,01

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2023

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2023, jumlah penduduk usia kerja tercatat sebanyak 551.272 orang. Jika dirinci menurut jenis kelamin, jumlah penduduk usia

kerja laki-laki sedikit lebih banyak daripada perempuan. Penduduk usia kerja laki-laki tercatat sebanyak 292.399 orang atau sekitar 53,04 persen dari total penduduk usia kerja di Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan jumlah penduduk usia kerja perempuan sebanyak 258.873 orang.

Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja yang bekerja dan pengangguran. Bukan angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya. Dari total 387.823 orang angkatan kerja, persentase penduduk yang bekerja mencapai 95,99 persen, sementara 4,01 persen termasuk pengangguran terbuka.



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2023

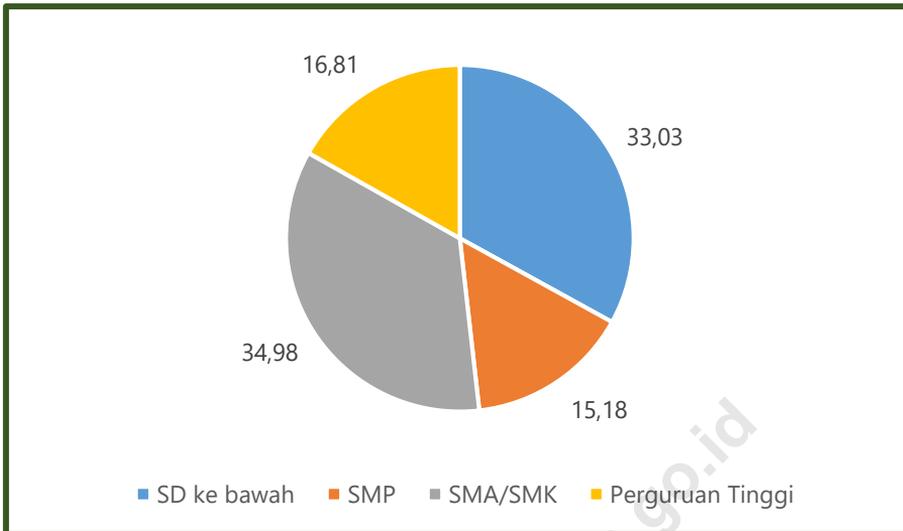
Gambar 6.1 *Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus) Provinsi Kalimantan Utara (persen), 2019–2023*

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2023) tren tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Utara cenderung

menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran sempat mengalami peningkatan akibat adanya pandemi COVID-19 yang membuat sejumlah masyarakat terpaksa menutup usahanya atau terkena PHK. Selanjutnya, adanya penanganan COVID-19 dan membaiknya perekonomian mampu kembali menurunkan angka pengangguran hingga menjadi 4,01 persen pada Agustus 2023.

Banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja dapat diidentifikasi dari angka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). TKK diukur sebagai persentase jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. TKK di Provinsi Kalimantan Utara pada Agustus 2023 mencapai 95,99 persen, artinya dari 100 orang angkatan kerja, sekitar 95 hingga 96 orang mempunyai kegiatan utama bekerja atau sementara tidak bekerja. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, TKK daerah perdesaan (97,01 persen) lebih tinggi daripada daerah perkotaan (95,36 persen).

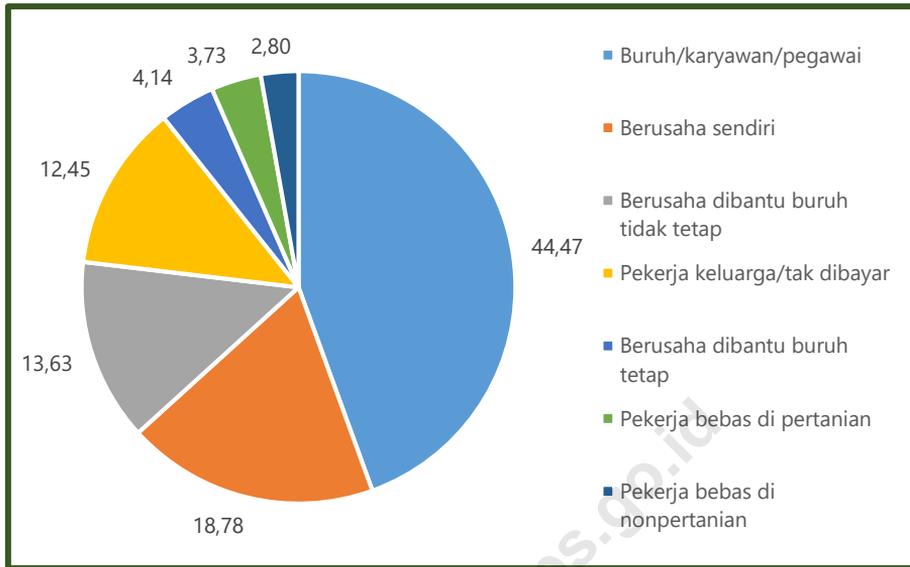
Gambaran umum penduduk yang bekerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Di Provinsi Kalimantan Utara, penduduk yang bekerja sebagian besar berpendidikan terakhir SD ke bawah (33,03 persen) dan SMA/SMK (34,98 persen). Penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan pada perguruan tinggi hanya 16,81 persen. Masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk bekerja di Provinsi Kalimantan Utara perlu lebih diperhatikan, terlebih pendidikan merupakan salah satu faktor dan modal untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Dengan kualitas pendidikan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan daya saing masyarakat dalam pasar tenaga kerja.



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2023

Gambar 6.2 *Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Kalimantan Utara (persen), Agustus 2023*

Untuk melihat gambaran kedudukan pekerja, dapat dilihat dari status pekerjaan. Hampir separuh dari total penduduk bekerja di Provinsi Kalimantan Utara merupakan buruh/karyawan/pegawai. Persentase pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai pada Agustus 2023 mencapai 44,47 persen. Selain sebagai buruh/karyawan/pegawai, sebagian besar pekerja berstatus berusaha sendiri sebesar 18,78 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar sebesar 13,63 persen, dan pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 12,45 persen. Lainnya, berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar sebesar 4,14 persen, pekerja bebas pertanian 3,73 persen, dan pekerja bebas non pertanian 2,80 persen.

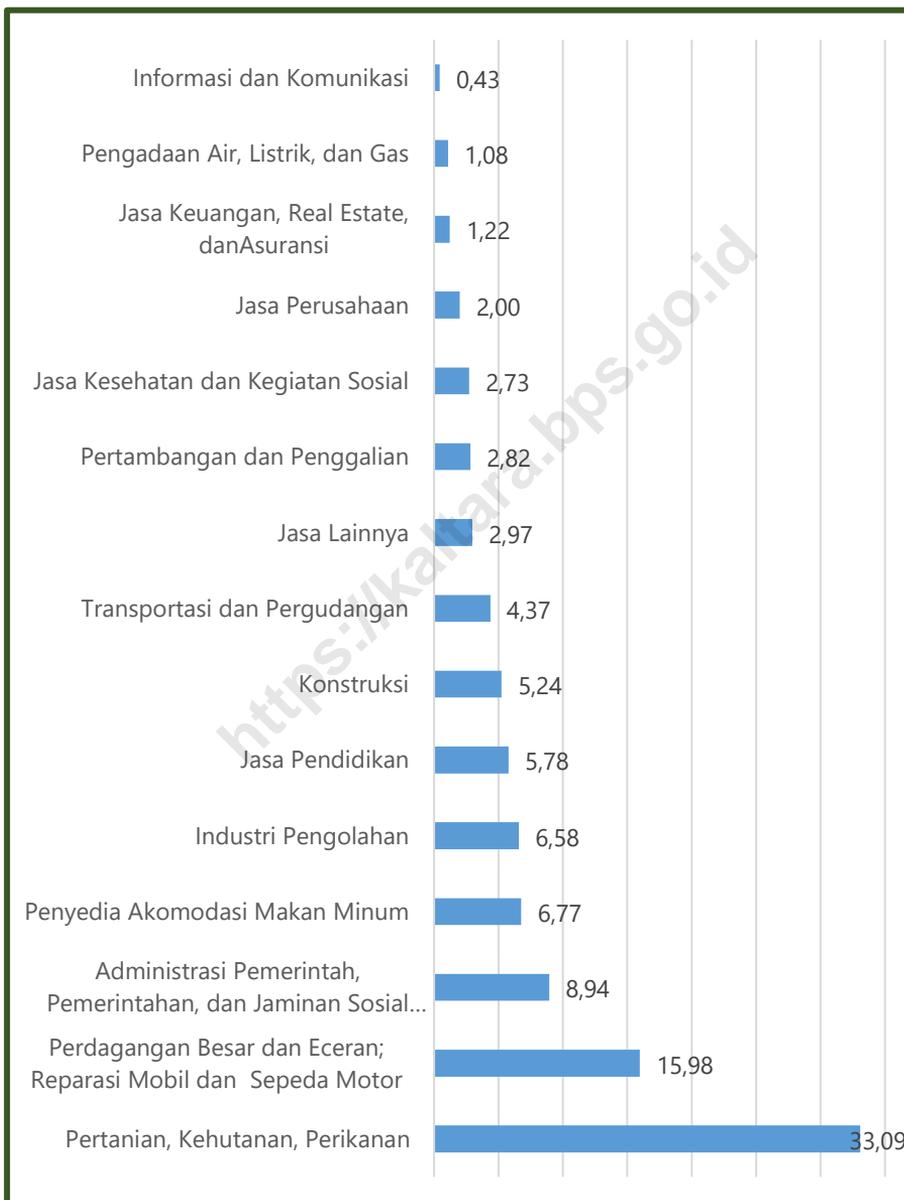


Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2023

Gambar 6.3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Utara (persen), Agustus 2023

Potensi sektor perekonomian dalam penyerapan tenaga kerja dapat ditinjau melalui proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha. Sekitar 33,09 persen penduduk bekerja di Provinsi Kalimantan Utara bekerja pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini dapat dipahami melihat potensi lahan dan kekayaan laut di Provinsi Kalimantan Utara. Sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan penopang perekonomian Kalimantan Utara justru memiliki kontribusi yang tidak begitu besar dalam penyerapan tenaga kerja, hanya 2,82 persen. Kategori lapangan usaha yang cukup banyak menyerap tenaga kerja selain pertanian adalah perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor (15,98 persen), dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (8,94 persen).

Sementara lapangan usaha lain menyerap tenaga kerja kurang dari tujuh persen dari total seluruh penduduk usia kerja yang bekerja.



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2023

Gambar 6.4 *Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Utara (persen), Agustus 2023*

Masalah ketenagakerjaan terkait juga dengan kemiskinan. Adanya pekerjaan yang layak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan hidup sejahtera. Sebaliknya, tanpa adanya pekerjaan yang layak dapat membawa masyarakat pada jurang kemiskinan.

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks sehingga dalam penanggulangannya membutuhkan analisis yang tepat. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk merumuskan persoalan kemiskinan sehingga pada akhirnya dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Faktor kultur dan struktural juga kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan sehingga

standar yang digunakan untuk menentukan penduduk sebagai penduduk miskin atau bukan miskin adalah garis kemiskinan.

Tren kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara selama 2019-2023 cukup berfluktuatif. Persentase penduduk miskin yang sudah menurun pada 2019, mengalami peningkatan pada 2020-2021. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang membawa berbagai dampak, utamanya pada aktivitas perekonomian yang terhambat. Walaupun demikian, seiring membaiknya perekonomian, pada tahun 2023 kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara kembali menurun hingga 6,45 persen.



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 6.5 *Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara (persen), 2019-2023*

Tabel 6.2 Garis Kemiskinan Menurut Daerah Kota dan Desa (Rupiah/Kapita/Bulan), 2019–2023

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	679.660	609.733	651.416
2020	714.492	632.586	681.035
2021	739.267	665.963	710.994
2022	804.517	719.982	772.914
2023	851.133	765.597	817.876

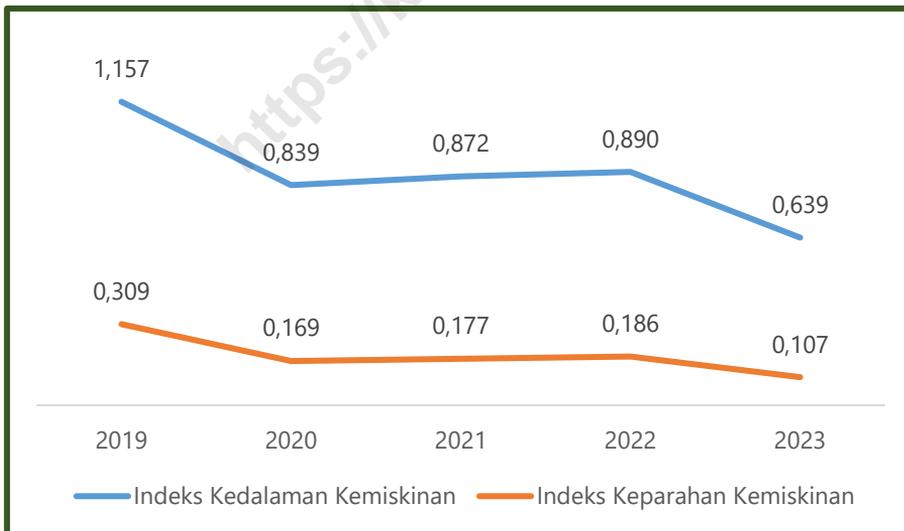
Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penentuan penduduk miskin juga dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Garis kemiskinan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Maret 2023, garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 817.876 rupiah per kapita per bulan. Besaran garis kemiskinan ini terdiri dari garis kemiskinan makanan sebesar 599.246 rupiah per kapita per bulan dan garis kemiskinan non makanan sebesar 218.630 rupiah per kapita per bulan. Jika dibandingkan menurut daerah, garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Hal ini menggambarkan bahwa pemenuhan hidup di perkotaan lebih mahal dibandingkan dengan daerah perdesaan.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan terkait kemiskinan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kedua dimensi ini masing-masing diukur dengan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing

penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2019-2023 berfluktuatif. Namun, pada 2023 angkanya cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020-2022 yang cenderung meningkat. Indeks kedalaman kemiskinan menurun menjadi 0,639 pada tahun 2023. Sementara, indeks keparahan kemiskinan menjadi 0,107 pada tahun 2023.

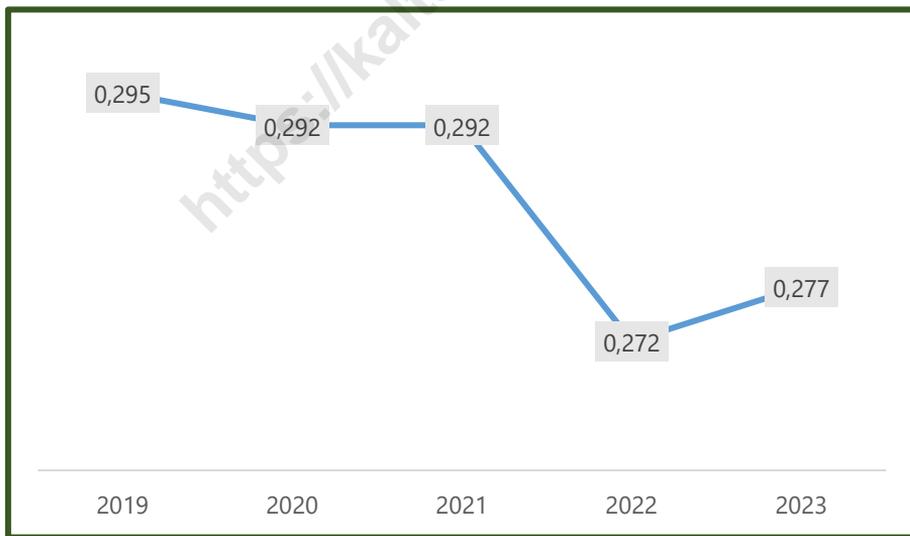


Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 6.6 Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara, 2019-2023

Pemerataan pendapatan merupakan salah satu prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah. Untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan secara menyeluruh, digunakan indikator koefisien gini. Koefisien gini berkisar antara nol sampai 1. Semakin besar angka koefisien gini mendekati 1, semakin timpang pendapatan masyarakat di wilayah tersebut.

Nilai koefisien gini Provinsi Kalimantan Utara terus mengecil dari tahun ke tahun, namun pada 2023 mengalami peningkatan. Koefisien gini Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 sebesar 0,277. Meningkatnya angka koefisien gini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat yang membesar atau meningkat.



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 6.7 Koefisien Gini Provinsi Kalimantan Utara, 2019–2023

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara. 2024. Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka. Katalog BPS:1102001.65.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara. 2024. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha 2019-2023. Katalog BPS:9302021.65.

<https://kaltara.bps.go.id>

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Jl. H. Masykur RT 19, Tanjung Selor Hilir, 77212
Telp.: (0552) 2035120; Email: bps6500@bps.go.id
Homepage: <https://kaltara.bps.go.id>

